



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Penyebab Utama Terjadinya Permasalahan Hukum dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Arif Budiman Anwar

Analisis Kebijakan Madya Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

The 9th Government Procurement Forum and Expo (GPFE) 2024

Yogyakarta, 17 Juli 2024

Sebab Terjadinya Permasalahan

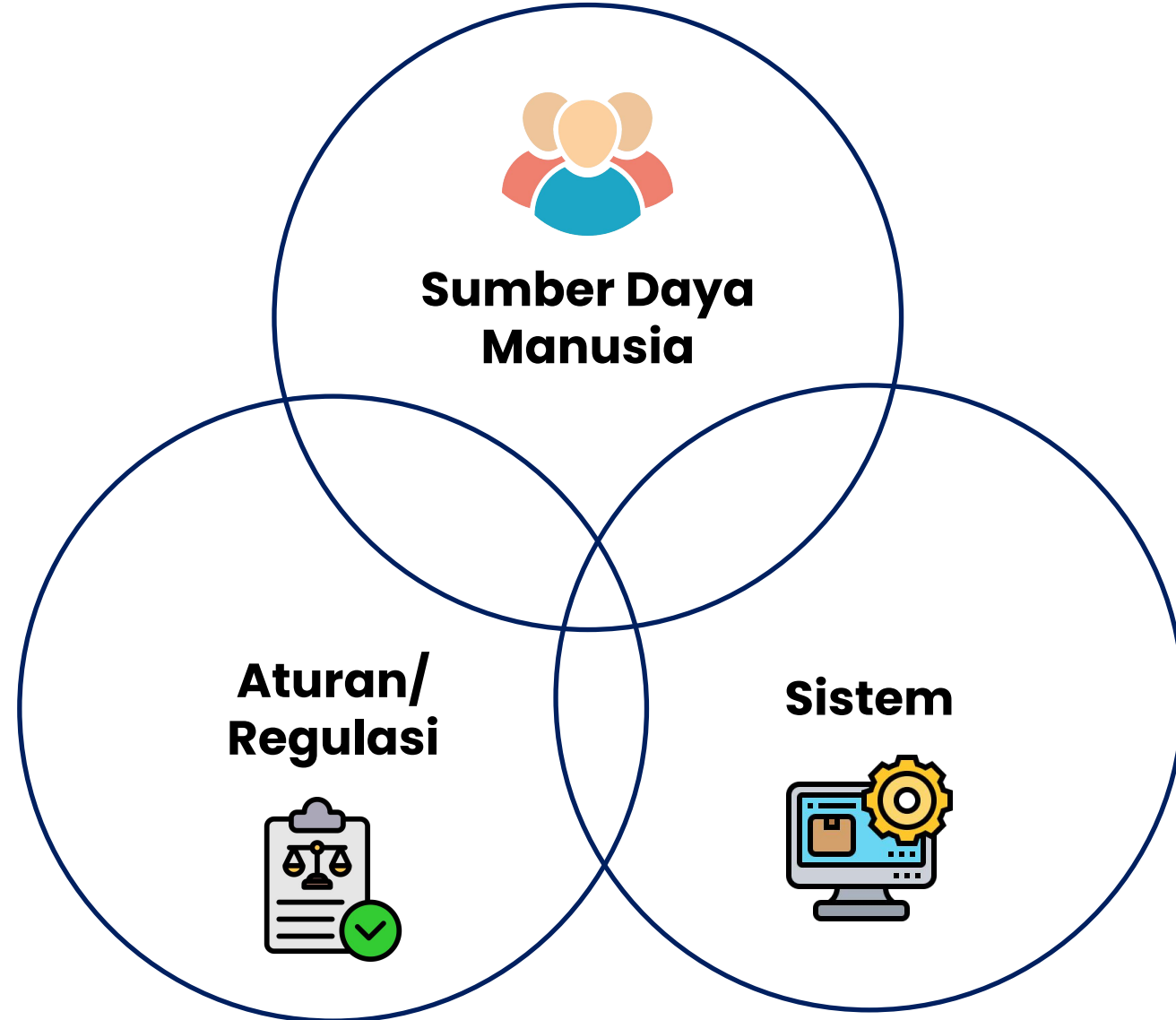
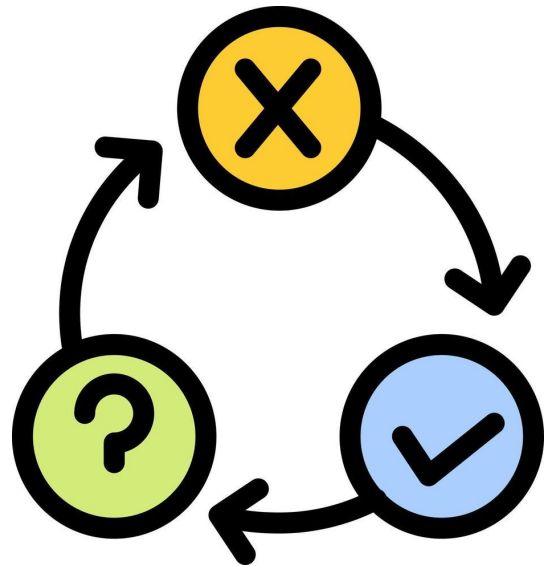


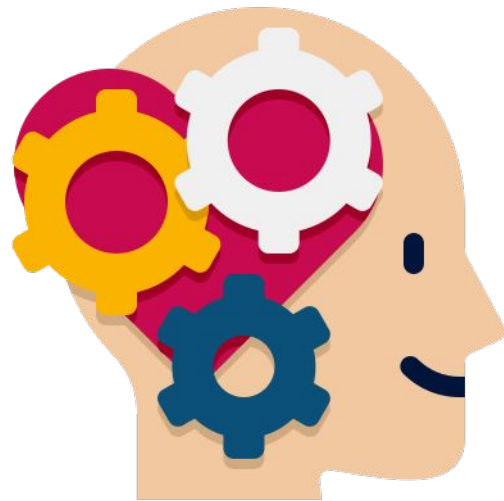
LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif





Ketidaktahuan

Kesengajaan

Keterpaksaan

Penyebab Permasalahan Hukum PBJP



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Tidak transparan
dalam berproses

Keputusan yang
diambil tidak
didukung justifikasi
dan dokumentasi
yang lengkap



Kurangnya Pengendalian Kontrak

Pengendali kontrak
yang kurang
kompeten

Beban kerja yang
terlalu besar

Ketiadaan tim
pendukung

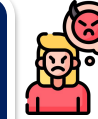
Klausul kontrak yang
tidak jelas



Ketidakharmonisan Regulasi

Kompleksitas
pengaturan

Jumlah pengaturan
yang terlalu banyak



Adanya Niat Jahat

Intervensi

Gratifikasi

Penyalahgunaan
wewenang

Persekongkolan

Ruang Lingkup Permasalahan PBJP

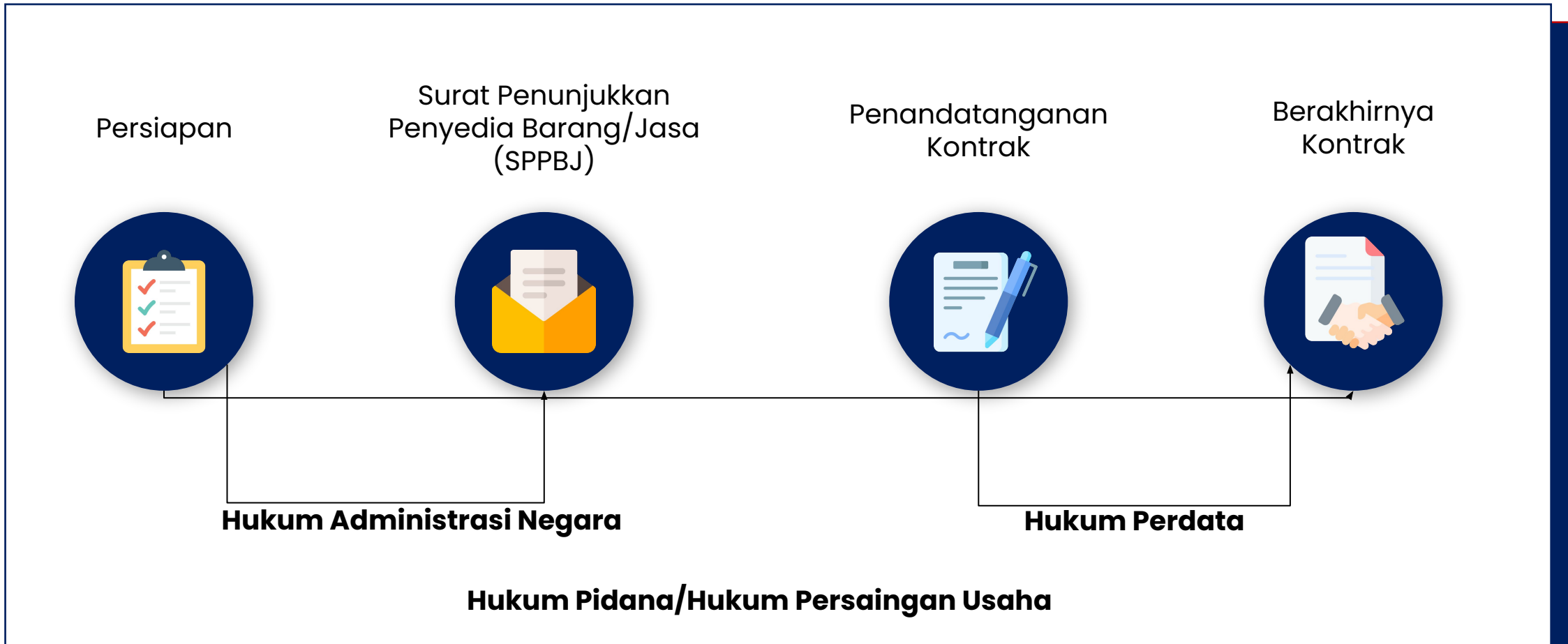


LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Perencanaan Pengadaan

- Pengadaan tanpa justifikasi identifikasi kebutuhan dan tidak didukung proses perencanaan yang sistematis
- Kurang tepat dalam menentukan cara pengadaan
- Tindakan pemecahan paket menghindari tender
- Adanya intervensi vendor sejak perencanaan
- Risalah pembahasan perencanaan pengadaan tidak terdokumentasikan
- Tidak mengumumkan RUP atau pemilihan penyedia dilakukan sebelum pengumuman RUP

Persiapan Pengadaan

- Penetapan spesifikasi teknis / KAK tanpa justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan
- Spesifikasi teknis / KAK diskriminatif
- Spesifikasi teknis / KAK sudah melibatkan vendor yang akan melaksanakan
- Spesifikasi teknis / KAK menyalin sama persis dengan produk atau merk tertentu



Pemilihan Penyedia

- Pemilihan metode pemilihan yang kurang tepat
- Evaluasi penawaran tanpa justifikasi teknis
- Penjadwalan yang dapat merugikan pihak tertentu
- Persekongkolan (Vertikal/Horizontal)
- Penambahan persyaratan yang tidak perlu/mengada-ada
- Pinjam perusahaan

Pelaksanaan Kontrak

- Ketidakjelasan yang menandatangani kontrak
- Pekerjaan dimulai tanpa kontrak
- Tidak dilakukan klarifikasi Jaminan
- Membuat substansi baru tanpa perubahan kontrak
- Pengalihan pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
- Lemahnya pengendalian kontrak
- Pemalsuan laporan data pekerjaan



Potensi Permasalahan Hukum PBJP



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Sengketa Informasi

**Perkara
Persaingan Usaha**

Sengketa Perdata

Perkara Pidana

**Sengketa Tata
Usaha Negara**



Layanan Pemberi Keterangan Ahli (PKA)

Merupakan layanan yang memberikan dukungan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada para instansi atau pengelola pengadaan terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam konteks pengadaan barang dan jasa.

Layanan ini dapat dimohonkan oleh Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Panitera/Majelis Hakim, KPPU, LPS Kontrak PBJP LKPP, Ombudsman, Instansi Pemerintah yang bersangkutan.



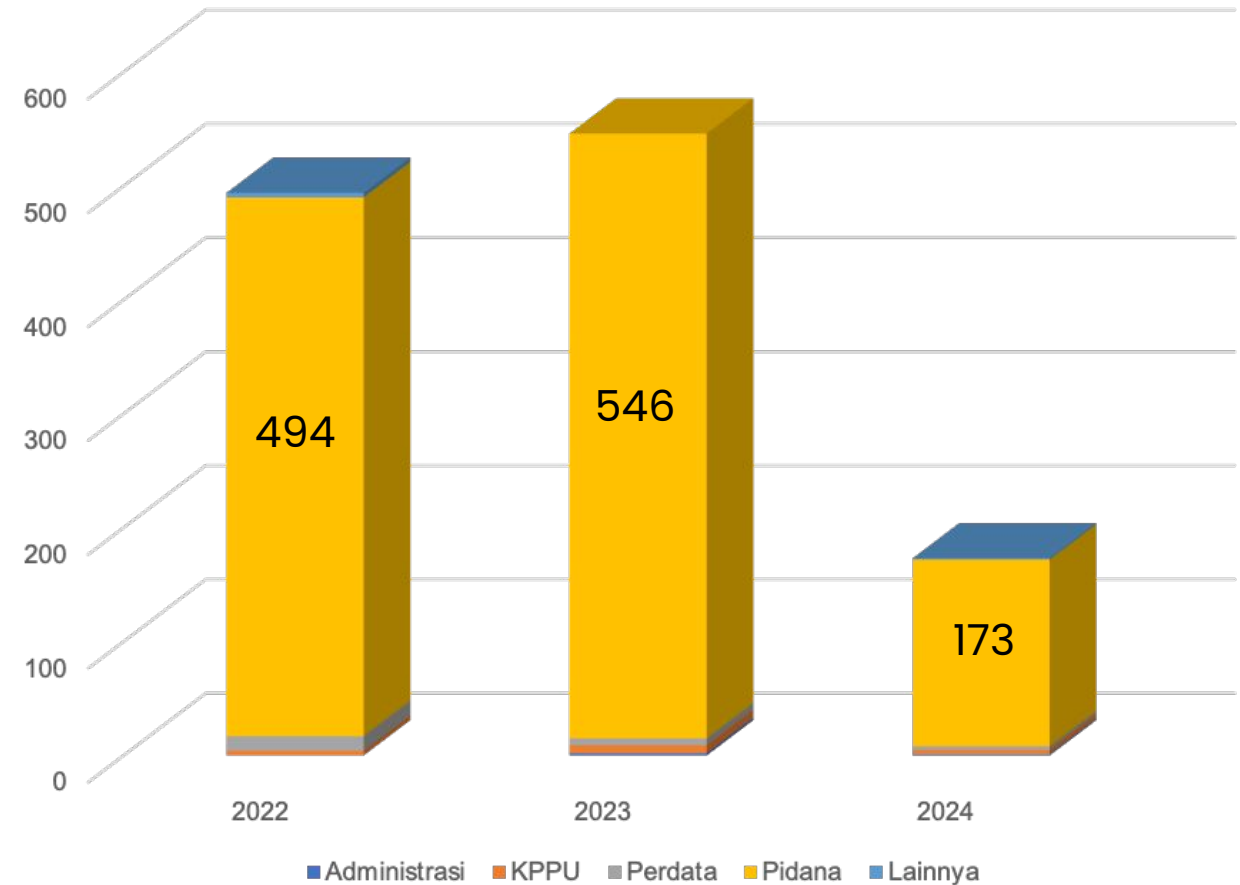
LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Penugasan PKA 2022 - Mei 2024



"Commitment is the foundation of great accomplishments." – Heidi Reeder

Terima Kasih